



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELISABETH RIA WIDYASRINI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 211087

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah Seluas 201 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/49 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/45 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/49 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 436.900.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.900.000
2. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
298.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CROWN SPR SL 2.0 MT Tahun 1992, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SCORPIO 5BP Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SCORPIO 5BP Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000



6. MOBIL, DAIHATSU MICRO/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 88.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	511.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.468.400.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.468.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.